

**ABSTRAK**

Nama : Nina Tania Rahayu  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum

Tesis ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana yang dikenakan kepada seorang Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris yang ruang lingkup kewenangannya dibidang hukum perdata tidaklah terlepas dari sanksi pidana, selain sanksi administrasi yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sanksi perdata. Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana dengan dakwaan pemalsuan terhadap akta otentik yang dibuatnya. Tetapi sampai saat ini banyaknya Notaris yang tidak mengetahui atau memahami sanksi-sanksi yang akan mereka hadapi dalam kewenangannya membuat akta otentik, khususnya sanksi pidana karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya kurang jelas, sehingga penulis membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap Notaris secara jelas. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus dalam penulisan ini hanya sebagai gambaran bagaimana sanksi pidana dapat dikenakan bagi seorang Notaris. Berdasarkan penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang menyangkut kewenangannya membuat akta otentik. Apabila penyidik, penuntut umum atau hakim ingin melakukan pemeriksaan terhadap Notaris beserta aktanya, maka harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Oleh karena itu, perlu adanya kecermatan dan ketelitian Notaris dalam membuat akta otentik agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum yang timbul. Selain itu, pengaturan sanksi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga perlu diperjelas.

Kata kunci : Sanksi pidana terhadap Notaris, Pemalsuan akta otentik, Pejabat umum.

## ABSTRACT

Name : Nina Tania Rahayu  
Study Program: Magister of Law specializing in Notary Studies  
Title : Imposing Criminal Sanction on Notary as Public Official

This thesis brings up the topic on imposing a criminal sanction to Notary as a public official who has the authority to draw up authentic deed, which is a perfect evidence. Within his/her authority in the private law, Notary is not spared/immune from criminal sanction, aside from the administrative sanction which is previously stipulated in the Law number 30 year 2004 regarding Notary and civil sanction. Notary may be charged by criminal sanction on the written statement (indictment) of giving false statement (misrepresentation) in his/her authentic deed. However, until this moment, a large number of Notary has no knowledge or understand the sanctions that they may be facing in connection to their incumbent authorization to draw up authentic deed, especially the criminal sanction because the provisions that are related are considered vague, hence the written intents to indulge oneself to explain the criminal sanction towards Notary more vividly. The method in writing used in this thesis is the normative juridical research and prevailing law and regulations. This case study in this thesis is only to provide a picture on how a criminal sanction can be imposed to a Notary. Based on the research and related theories, the writer can conclude that Notary can be imposed criminal sanction if proven guilty in criminal act related to the incumbent authority in drawing up authentic deeds. If the investigator, the public prosecutor or the judge intent to make an investigation towards a Notary based on his/her deeds, an approval from the District Supervisory Magistrate must be obtained. As a result, Notary need to be diligent and smart in drawing up authentic deeds in the future as to prevent any problem to arise. Aside from that, the provision regarding the sanctions in the Law number 30 year 2004 regarding the Notary needs to be made much clearer.

Keywords : Criminal sanctions towards Notary, Misrepresentation of an authentic deed, Public Official.